

## **ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS *WEBSITE* PADA PEMERINTAH DAERAH SE-JAWA**

**Anissa Adriana**

Dengan adanya desentralisasi yang ada di Indonesia, daerah memiliki kesempatan dan keleluasaan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya secara mandiri termasuk dari segi keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan dapat meminimalkan ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut kemudian mendorong ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ/2012 yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menampilkan informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah di *website* resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada setiap pemerintah daerah se-Jawa. Penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan, dan frekuensi pengungkapan dari dokumen pengelolaan keuangan daerah yang ada di *website* resmi. Penilaian tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki indeks transparansi tertinggi pada tahun 2015 sedangkan Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki indeks transparansi terendah pada tahun 2015. Untuk tahun 2016, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks transparansi tertinggi sedangkan Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki indeks transparansi terendah. Hasil pengkategorian menurut *Open Budget Index* (OBI) menunjukkan bahwa hanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang termasuk dalam kategori *sufficient* pada tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016, seluruh pemerintah daerah di Jawa termasuk dalam kategori *insufficient*. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Jawa.

Secara umum, pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang memiliki indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kekayaan pemda yang lebih tinggi, kompetisi politik yang lebih rendah, *press visibility* yang lebih tinggi, dan Indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.

**Kata Kunci:** *Transparansi, Good Governance, Asymmetry Information, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah.*

## PENDAHULUAN

Asas desentralisasi yang ada di Indonesia merupakan suatu proses pemindahan kewenangan melalui penyerahan dari pusat kepada daerah sehingga daerah memiliki kesempatan dan keleluasaan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya secara mandiri seperti yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dilengkapi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, ditetapkan peraturan turunan yang lebih rinci mengatur keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Peraturan pemerintah tersebut menjadi salah satu dasar ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat

waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu caranya ialah dengan menyediakan *website* sebagai portal untuk mengakses informasi publik. Pentingnya *website* dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi dasar Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Dalam instruksi tersebut pemerintah daerah diminta untuk menyediakan menu/*subdomain* dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* resmi pemerintah daerah beserta dokumen-dokumen yang harus dimuat di dalamnya.

Meskipun peraturan perundangan terkait kewajiban mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan dokumen apa saja yang perlu disajikan telah ditetapkan, pemerintah pusat belum pernah melakukan pengukuran dan pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketaatan terhadap peraturan perundangan tersebut. Tanpa adanya pengukuran dan pemeringkatan, pemerintah daerah cenderung mengabaikan arti penting transparansi dan tidak memiliki semangat berkompetisi untuk menjadi lebih baik dalam hal transparansi pengelolaan keuangan. Dengan penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah dan masyarakatnya dapat mengetahui tingkat dan pentingnya

transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga masyarakat sebagai *principal* dapat memercayai kerja pemerintah sebagai *agent*.

Di samping itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pemerintah pusat untuk mengawasi terlaksananya aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian yang tepat dan dapat melakukan pengukuran serta pemeringkatan atas transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. *Agency Theory*

Pada sektor publik hubungan keagenan terjadi di antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Hubungan kontrak yang terbentuk berfokus pada bagaimana pemerintah sebagai penerima amanah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat selaku pemberi amanah. Permasalahan ketidakseimbangan penguasaan informasi antara agen dan prinsipal (*information asymmetry*) terjadi juga pada sektor publik. Menurut Attila (2012) ketika prinsipal mengoptimalkan pengawasannya serta dapat memperoleh data yang penting dan relevan dari agen, permasalahan asimetri informasi dapat berkurang.

### b. *Good Governance*

UNPAN dalam UN ESCAP (2007) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu sistem yang transparan, akuntabel, adil, demokratis, partisipatif,

dan responsif terhadap kebutuhan manusia. *Good governance* memiliki beberapa elemen seperti yang dinyatakan oleh African Development Bank dalam International Fund for Agricultural Development (1999) bahwa elemen-elemen dari *good governance* terdiri atas akuntabilitas, transparansi, perlawanan terhadap korupsi, partisipatif, serta reformasi hukum dan yudisial.

### c. *Transparansi*

Arista (2015) menjelaskan transparansi sebagai ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan pemerintah. Dalam mengukur transparansi atas pengelolaan keuangan di sektor publik terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi dasar pengukuran. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (2013) menyatakan bahwa kriteria utama dalam keterbukaan informasi idealnya adalah tersedianya informasi anggaran, tersedianya informasi yang cukup, dapat diakses, dan dipublikasikan tepat waktu. Salah satu cara untuk menyampaikan informasi yang efektif dan efisien ialah dengan menggunakan *website*.

Pentingnya ketersediaan informasi publik pada *website* mendorong terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Dalam instruksi tersebut, pemerintah daerah diinstruksikan untuk menyediakan

menu/*subdomain* tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah pada *website* resminya.

#### **d. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Huwae (2016) mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai pengelolaan APBD yang dinilai dengan uang yang kegiatannya dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan yang harus dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta taat kepada peraturan dan bermanfaat untuk masyarakat. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengartikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

#### **e. Penelitian Terdahulu**

Martani *et al.* (2014) mengukur transparansi keuangan dan kinerja pemerintah daerah berdasarkan *website* pemerintah daerah. Huwae (2016) melakukan analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Syamsul (2017) mengukur tingkat transparansi pada tiga tahapan utama pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan tiga kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas dan ketepatan waktu pengungkapan menggunakan 29 indikator dari hasil penelitian Huwae

(2016). Akan tetapi penelitian hanya dilakukan dengan observasi data pada 34 *website* resmi pemerintah provinsi se-Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini ialah *website* resmi pemerintah daerah se-Jawa yang akan dinilai transparansi pengelolaan keuangan daerahnya dengan melihat informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam *website* tersebut. Pemerintah daerah di Jawa tersebut meliputi enam pemerintah provinsi, 84 pemerintah kabupaten, dan 29 pemerintah kota.

#### **a. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder berupa informasi pengelolaan keuangan daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016. Sumber data sekunder diperoleh dari *website* resmi pemerintah daerah se-Jawa. Selain itu, data sekunder lain yang dibutuhkan ialah informasi yang terkait dengan karakteristik pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang memiliki tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dan terendah.

#### **b. Analisis Data**

##### *Penilaian Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*

Transparansi pengelolaan keuangan daerah diukur dengan menggunakan

empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan informasi, dan frekuensi pengungkapan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Informasi dikatakan tersedia apabila dokumen indikator di setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah tersedia di *website* resmi pemerintah daerah, sedangkan apabila dokumen tersebut dapat diunduh secara mandiri oleh publik maka informasi tersebut dikatakan dapat diakses (aksesibilitas).

Ketepatan waktu dinilai berdasarkan perbandingan tanggal unggah pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi pengelolaan keuangan daerah dengan tanggal penetapan sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan (Syamsul, 2017). Dalam penelitian ini, rentang waktu yang dipersyaratkan adalah 30 hari setelah dokumen pengelolaan keuangan daerah ditetapkan. Frekuensi pengungkapan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan tersedianya informasi transparansi pengelolaan keuangan daerah per indikator dalam runtut waktu tertentu. Runtut waktu yang ditetapkan dalam penelitian ini ialah tiga tahun ke belakang dengan batas akhir tahun 2012 dengan pertimbangan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) baru ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2012.

Pengukuran kelengkapan kriteria transparansi sebagaimana disebutkan di atas dilakukan untuk memperoleh indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Menggunakan skor dikotomi sehingga jika indikator tersedia di *website* maka diberi nilai 1 untuk setiap indikator pada empat kriteria utama. Apabila indikator tidak tersedia, tidak dapat diakses, atau tidak tepat waktu maka diberi nilai 0 untuk setiap indikator. Untuk kriteria frekuensi pengungkapan apabila indikator tidak tersedia akan diberi nilai 0, apabila indikator tersedia dalam satu tahun akan diberi nilai sepertiga, indikator tersedia dalam dua tahun akan diberi nilai dua per tiga sedangkan apabila indikator tersedia dalam tiga tahun berturut-turut akan diberi nilai 1.
- 2) Empat kriteria utama memiliki bobot penilaian yang akan dikalikan dengan nilai yang diperoleh di setiap indikator. Baik ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan maupun frekuensi pengungkapan memiliki bobot yang sama yaitu 0,25.
- 3) Hasil perkalian bobot dan nilai pada setiap indikator kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor total setiap pemerintah daerah.
- 4) Indeks transparansi dihitung dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh dari

seluruh indikator.

5) Setelah indeks transparansi diketahui, maka pemerintah daerah dapat dirangking sesuai dengan tingkat transparansi yang diperolehnya.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah kemudian diperingkat berdasarkan pada *Open Budget Index*

(OBI) yang merupakan kategori peringkat yang digunakan International Budget Partnership (IBP) dalam menetapkan peringkat indeks keterbukaan anggaran di 102 negara pada tahun 2015. Tingkat kategori keterbukaan informasi anggaran berdasarkan OBI ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

| No. | Tingkat Keterbukaan Anggaran        | Kategori                           | Skor   |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1   | Cukup ( <i>Sufficient</i> )         | Ekstensif ( <i>Extensive</i> )     | 81-100 |
|     |                                     | Substansial ( <i>Substansial</i> ) | 61-80  |
| 2   | Tidak Cukup ( <i>Insufficient</i> ) | Terbatas ( <i>Limited</i> )        | 41-60  |
|     |                                     | Minimal ( <i>Minimal</i> )         | 21-40  |
|     |                                     | Sedikit ( <i>Scant or None</i> )   | 0-20   |

Sumber: IBP (2015)

#### *Pengidentifikasian Karakteristik Pemerintah Daerah dengan Tingkat Transparansi Tertinggi dan Terendah*

Pengidentifikasian dilakukan pada 10 pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan 10 pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah. Untuk pemerintah provinsi yang masuk dalam peringkat 10 tertinggi ataupun 10 terendah, tidak dilakukan pengidentifikasian, karena secara umum pemerintah provinsi memiliki kondisi pemerintahan yang berbeda dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak dapat dibandingkan. Pengidentifikasian dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan

mencari data dan informasi terkait kondisi pemerintah kabupaten/kota yang relevan dengan penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah.

#### **c. Validitas Data**

Untuk menjaga validitas data, metode yang akan digunakan ialah pengecekan berulang kali dan *peer debriefing*. Pengecekan berulang kali dilakukan terhadap *website* resmi pemerintah daerah selama tanggal penelitian. Pihak yang akan menjadi *peer debriefer* dalam penelitian ini ialah dosen pembimbing tesis dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada program Magister Akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### *Penilaian Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*

Terdapat 119 pemerintah daerah di Jawa yang menjadi objek penelitian dan seluruhnya memiliki *website* yang berada dalam kondisi aktif dan dapat diakses. Dalam penelitian ini terdapat empat kriteria yang digunakan untuk menilai transparansi informasi pengelolaan keuangan daerah yang diunggah dalam *website* resmi pemerintah daerah, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan. Masa pengamatan terhadap *website* resmi pemerintah daerah di Jawa dimulai dari tanggal 30 Maret 2017 hingga 31 Mei 2017. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.

Pada tahap perencanaan, terdapat 10 indikator penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari informasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), ringkasan Prioritas dan Plafon Anggaran, ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD, ringkasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, serta

ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan PPKD.

Pada tahap pelaksanaan, terdapat sembilan indikator penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah yaitu ditampilkannya informasi Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja, Realisasi Pembiayaan, ringkasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan APBD, Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, indikator penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2015 terdiri dari 10 indikator yang meliputi dari informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, informasi Laporan Arus Kas, informasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD, informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD, informasi Neraca, informasi CaLK Pemerintah Daerah, informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015. Untuk tahun 2016, jumlah indikator berkurang dua sehingga terdiri dari delapan

indikator. Hal tersebut dikarenakan pada saat akhir pengamatan *website*, belum seluruh pemerintah daerah dapat menyajikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016.

Berdasarkan hasil pemeringkatan, Kabupaten Bojonegoro memiliki skor tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 17,83 (61,49%) sehingga Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat pertama dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah se-Jawa pada tahun 2015. Sebaliknya, Kabupaten Indramayu memiliki skor terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,83 (2,87%)

sehingga Kabupaten Indramayu menduduki peringkat ke-119 dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah se-Jawa pada tahun 2015. Apabila dilihat dari tahap pengelolaan keuangan daerah, tahap yang paling banyak dipenuhi oleh pemerintah daerah se-Jawa ialah tahap pelaksanaan dengan rata-rata skor sebesar 3,30. Selanjutnya, tahap yang paling sedikit dipenuhi ialah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan rata-rata skor sebesar 2,08. Hasil penilaian tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

| No. | Nama Pemerintah Daerah | Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah |             |                                  | Total | Indeks (%) |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|------------|
|     |                        | Perencanaan                         | Pelaksanaan | Pelaporan dan Pertanggungjawaban |       |            |
| 1   | Kabupaten Bojonegoro   | 6,50                                | 6,50        | 4,83                             | 17,83 | 61,49      |
| 2   | Kabupaten Trenggalek   | 5,50                                | 4,92        | 6,67                             | 17,08 | 58,91      |
| 3   | Kabupaten Banyuwangi   | 4,50                                | 6,33        | 5,67                             | 16,50 | 56,90      |
| 4   | Kota Bandung           | 5,00                                | 5,33        | 5,50                             | 15,83 | 54,60      |
| 5   | D.I. Yogyakarta        | 4,25                                | 5,92        | 5,42                             | 15,58 | 53,74      |
| 6   | Kabupaten Batang       | 4,50                                | 5,08        | 5,75                             | 15,33 | 52,87      |
| 7   | Kabupaten Malang       | 5,50                                | 5,25        | 4,08                             | 14,83 | 51,15      |
| 8   | Kabupaten Jombang      | 5,00                                | 5,58        | 4,08                             | 14,67 | 50,57      |
| 9   | Kota Yogyakarta        | 6,17                                | 5,92        | 2,58                             | 14,67 | 50,57      |
| 10  | Kabupaten Sampang      | 4,17                                | 5,25        | 4,50                             | 13,92 | 47,99      |
| 11  | Provinsi Banten        | 4,17                                | 5,83        | 3,75                             | 13,75 | 47,41      |
| 12  | Kota Magelang          | 4,67                                | 5,67        | 3,25                             | 13,58 | 46,84      |
| 13  | Provinsi Jawa Timur    | 4,25                                | 4,42        | 4,67                             | 13,33 | 45,98      |
| 14  | Kota Surabaya          | 4,50                                | 5,00        | 3,67                             | 13,17 | 45,40      |
| 15  | Kabupaten Purworejo    | 5,00                                | 3,83        | 4,17                             | 13,00 | 44,83      |
| 16  | Provinsi Jawa Tengah   | 4,00                                | 4,67        | 4,08                             | 12,75 | 43,97      |
| 17  | Kabupaten Demak        | 4,58                                | 4,67        | 3,50                             | 12,75 | 43,97      |
| 18  | Kabupaten Cilacap      | 2,75                                | 4,75        | 4,92                             | 12,42 | 42,82      |
| 19  | Kota Cirebon           | 3,08                                | 5,17        | 4,17                             | 12,42 | 42,82      |



| No. | Nama Pemerintah Daerah | Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah |             |                                  | Total | Indeks (%) |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|------------|
|     |                        | Perencanaan                         | Pelaksanaan | Pelaporan dan Pertanggungjawaban |       |            |
| 20  | Kabupaten Kudus        | 5,17                                | 3,42        | 3,75                             | 12,33 | 42,53      |
| 21  | Provinsi DKI Jakarta   | 1,25                                | 5,67        | 4,92                             | 11,83 | 40,80      |
| 22  | Kabupaten Brebes       | 4,92                                | 3,58        | 3,00                             | 11,50 | 39,66      |
| 23  | Kabupaten Kulonprogo   | 3,33                                | 3,50        | 4,58                             | 11,42 | 39,37      |
| 24  | Kabupaten Blitar       | 4,83                                | 4,42        | 2,08                             | 11,33 | 39,08      |
| 25  | Kabupaten Bantul       | 4,83                                | 4,42        | 1,75                             | 11,00 | 37,93      |
| 26  | Kabupaten Sleman       | 4,42                                | 3,08        | 3,42                             | 10,92 | 37,64      |
| 27  | Kabupaten Pekalongan   | 4,42                                | 4,08        | 2,25                             | 10,75 | 37,07      |
| 28  | Kabupaten Tegal        | 5,33                                | 4,08        | 1,33                             | 10,75 | 37,07      |
| 29  | Kabupaten Sidoarjo     | 1,67                                | 5,00        | 3,83                             | 10,50 | 36,21      |
| 30  | Kabupaten Blora        | 3,50                                | 5,50        | 1,50                             | 10,50 | 36,21      |
| 31  | Kabupaten Kuningan     | 3,83                                | 3,83        | 2,75                             | 10,42 | 35,92      |
| 32  | Kota Surakarta         | 1,58                                | 4,83        | 3,83                             | 10,25 | 35,34      |
| 33  | Kota Malang            | 3,25                                | 4,92        | 2,08                             | 10,25 | 35,34      |
| 34  | Kabupaten Tulungagung  | 2,08                                | 4,92        | 3,17                             | 10,17 | 35,06      |
| 35  | Kabupaten Pematang     | 2,33                                | 4,75        | 3,08                             | 10,17 | 35,06      |
| 36  | Kabupaten Grobogan     | 4,83                                | 3,83        | 1,42                             | 10,08 | 34,77      |
| 37  | Kabupaten Magelang     | 2,58                                | 4,17        | 3,17                             | 9,92  | 34,20      |
| 38  | Kabupaten Majalengka   | 1,75                                | 4,08        | 3,83                             | 9,67  | 33,33      |
| 39  | Kabupaten Sukoharjo    | 1,42                                | 4,58        | 3,67                             | 9,67  | 33,33      |
| 40  | Kabupaten Klaten       | 3,33                                | 4,83        | 1,50                             | 9,67  | 33,33      |
| 41  | Kabupaten Kendal       | 5,50                                | 3,75        | 0,33                             | 9,58  | 33,05      |
| 42  | Kabupaten Bandung      | 3,33                                | 4,33        | 1,83                             | 9,50  | 32,76      |
| 43  | Kabupaten Purbalingga  | 2,92                                | 4,50        | 1,92                             | 9,33  | 32,18      |
| 44  | Kota Bekasi            | 1,50                                | 4,58        | 3,17                             | 9,25  | 31,90      |
| 45  | Kabupaten Wonosobo     | 1,33                                | 4,17        | 3,67                             | 9,17  | 31,61      |
| 46  | Kabupaten Garut        | 2,42                                | 3,92        | 2,83                             | 9,17  | 31,61      |
| 47  | Kota Blitar            | 4,25                                | 3,42        | 1,50                             | 9,17  | 31,61      |
| 48  | Kota Probolinggo       | 3,50                                | 2,83        | 2,75                             | 9,08  | 31,32      |
| 49  | Kota Tangerang         | 3,00                                | 3,83        | 2,25                             | 9,08  | 31,32      |
| 50  | Kabupaten Pasuruan     | 3,33                                | 2,75        | 2,92                             | 9,00  | 31,03      |
| 51  | Kabupaten Bogor        | 1,67                                | 4,42        | 2,83                             | 8,92  | 30,75      |
| 52  | Kabupaten Tasikmalaya  | 3,33                                | 2,75        | 2,75                             | 8,83  | 30,46      |
| 53  | Kabupaten Temanggung   | 1,17                                | 3,58        | 3,92                             | 8,67  | 29,89      |
| 54  | Kabupaten Semarang     | 1,25                                | 3,58        | 3,50                             | 8,33  | 28,74      |
| 55  | Kabupaten Gunungkidul  | 1,33                                | 3,83        | 3,00                             | 8,17  | 28,16      |
| 56  | Kabupaten Banyumas     | 1,33                                | 4,17        | 2,67                             | 8,17  | 28,16      |
| 57  | Kabupaten Rembang      | 1,42                                | 4,42        | 2,33                             | 8,17  | 28,16      |
| 58  | Kabupaten Cirebon      | 3,58                                | 3,25        | 1,00                             | 7,83  | 27,01      |

| No. | Nama Pemerintah Daerah | Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah |             |                                  | Total | Indeks (%) |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|------------|
|     |                        | Perencanaan                         | Pelaksanaan | Pelaporan dan Pertanggungjawaban |       |            |
| 59  | Kota Kediri            | 1,75                                | 2,92        | 3,08                             | 7,75  | 26,72      |
| 60  | Kabupaten Banjarnegara | 1,50                                | 3,17        | 3,00                             | 7,67  | 26,44      |
| 61  | Kabupaten Kebumen      | 1,08                                | 3,50        | 2,67                             | 7,25  | 25,00      |
| 62  | Kota Depok             | 1,50                                | 4,58        | 1,08                             | 7,17  | 24,71      |
| 63  | Kota Semarang          | 2,58                                | 3,17        | 1,33                             | 7,08  | 24,43      |
| 64  | Kabupaten Serang       | 1,33                                | 3,25        | 2,42                             | 7,00  | 24,14      |
| 65  | Provinsi Jawa Barat    | 2,67                                | 3,50        | 0,83                             | 7,00  | 24,14      |
| 66  | Kota Pasuruan          | 0,50                                | 3,92        | 2,50                             | 6,92  | 23,85      |
| 67  | Kabupaten Lebak        | 2,25                                | 3,42        | 1,25                             | 6,92  | 23,85      |
| 68  | Kabupaten Pandeglang   | 3,17                                | 3,17        | 0,58                             | 6,92  | 23,85      |
| 69  | Kota Bogor             | 4,08                                | 1,75        | 0,83                             | 6,67  | 22,99      |
| 70  | Kabupaten Karanganyar  | 0,58                                | 4,00        | 2,00                             | 6,58  | 22,70      |
| 71  | Kota Salatiga          | 1,42                                | 3,75        | 1,42                             | 6,58  | 22,70      |
| 72  | Kabupaten Tuban        | 1,25                                | 2,75        | 2,50                             | 6,50  | 22,41      |
| 73  | Kabupaten Pati         | 0,25                                | 3,50        | 2,58                             | 6,33  | 21,84      |
| 74  | Kabupaten Ponorogo     | 1,67                                | 2,83        | 1,25                             | 5,75  | 19,83      |
| 75  | Kota Tegal             | 0,75                                | 2,92        | 2,00                             | 5,67  | 19,54      |
| 76  | Kabupaten Mojokerto    | 0,83                                | 3,08        | 1,58                             | 5,50  | 18,97      |
| 77  | Kabupaten Sumedang     | 3,67                                | 1,33        | 0,50                             | 5,50  | 18,97      |
| 78  | Kota Cilegon           | 1,25                                | 3,17        | 0,92                             | 5,33  | 18,39      |
| 79  | Kota Cimahi            | 1,75                                | 3,33        | 0,25                             | 5,33  | 18,39      |
| 80  | Kota Banjar            | 1,25                                | 3,00        | 0,92                             | 5,17  | 17,82      |
| 81  | Kota Batu              | 2,50                                | 1,42        | 1,08                             | 5,00  | 17,24      |
| 82  | Kabupaten Pacitan      | 0,75                                | 2,42        | 1,75                             | 4,92  | 16,95      |
| 83  | Kabupaten Probolinggo  | 0,67                                | 2,92        | 1,08                             | 4,67  | 16,09      |
| 84  | Kabupaten Bangkalan    | 0,67                                | 3,08        | 0,75                             | 4,50  | 15,52      |
| 85  | Kabupaten Sumenep      | 1,92                                | 1,83        | 0,75                             | 4,50  | 15,52      |
| 86  | Kabupaten Karawang     | 0,00                                | 2,33        | 2,08                             | 4,42  | 15,23      |
| 87  | Kabupaten Boyolali     | 0,58                                | 3,08        | 0,75                             | 4,42  | 15,23      |
| 88  | Kabupaten Subang       | 1,25                                | 2,33        | 0,75                             | 4,33  | 14,94      |
| 89  | Kota Mojokerto         | 2,25                                | 1,67        | 0,42                             | 4,33  | 14,94      |
| 90  | Kabupaten Pangandaran  | 1,08                                | 2,17        | 0,83                             | 4,08  | 14,08      |
| 91  | Kabupaten Situbondo    | 0,75                                | 2,50        | 0,75                             | 4,00  | 13,79      |
| 92  | Kabupaten Gresik       | 1,25                                | 1,58        | 0,83                             | 3,67  | 12,64      |
| 93  | Kabupaten Purwakarta   | 0,75                                | 2,08        | 0,75                             | 3,58  | 12,36      |
| 94  | Kabupaten Kediri       | 1,00                                | 2,17        | 0,42                             | 3,58  | 12,36      |
| 95  | Kabupaten Lamongan     | 1,50                                | 1,75        | 0,33                             | 3,58  | 12,36      |
| 96  | Kota Pekalongan        | 0,58                                | 2,42        | 0,50                             | 3,50  | 12,07      |
| 97  | Kabupaten Wonogiri     | 0,50                                | 1,83        | 1,08                             | 3,42  | 11,78      |

| No. | Nama Pemerintah Daerah  | Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah |             |                                  | Total       | Indeks (%)   |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------|
|     |                         | Perencanaan                         | Pelaksanaan | Pelaporan dan Pertanggungjawaban |             |              |
| 98  | Kota Tangerang Selatan  | 0,67                                | 2,00        | 0,50                             | 3,17        | 10,92        |
| 99  | Kabupaten Sragen        | 0,00                                | 3,17        | 0,00                             | 3,17        | 10,92        |
| 100 | Kabupaten Nganjuk       | 0,00                                | 2,42        | 0,17                             | 2,58        | 8,91         |
| 101 | Kabupaten Ngawi         | 0,08                                | 1,67        | 0,50                             | 2,25        | 7,76         |
| 102 | Kabupaten Bondowoso     | 0,50                                | 0,83        | 0,75                             | 2,08        | 7,18         |
| 103 | Kabupaten Tangerang     | 0,00                                | 0,83        | 1,08                             | 1,92        | 6,61         |
| 104 | Kabupaten Lumajang      | 0,50                                | 0,92        | 0,50                             | 1,92        | 6,61         |
| 105 | Kota Tasikmalaya        | 0,50                                | 1,17        | 0,25                             | 1,92        | 6,61         |
| 106 | Kabupaten Sukabumi      | 0,83                                | 0,83        | 0,00                             | 1,67        | 5,75         |
| 107 | Kabupaten Bandung Barat | 0,17                                | 1,08        | 0,25                             | 1,50        | 5,17         |
| 108 | Kabupaten Pamekasan     | 0,50                                | 0,92        | 0,08                             | 1,50        | 5,17         |
| 109 | Kabupaten Ciamis        | 0,00                                | 0,83        | 0,58                             | 1,42        | 4,89         |
| 110 | Kota Serang             | 0,25                                | 0,83        | 0,25                             | 1,33        | 4,60         |
| 111 | Kabupaten Madiun        | 0,00                                | 1,08        | 0,25                             | 1,33        | 4,60         |
| 112 | Kabupaten Bekasi        | 0,50                                | 0,83        | 0,00                             | 1,33        | 4,60         |
| 113 | Kota Sukabumi           | 0,08                                | 0,83        | 0,08                             | 1,00        | 3,45         |
| 114 | Kabupaten Jepara        | 0,08                                | 0,92        | 0,00                             | 1,00        | 3,45         |
| 115 | Kabupaten Magetan       | 0,00                                | 0,92        | 0,00                             | 0,92        | 3,16         |
| 116 | Kota Madiun             | 0,00                                | 0,92        | 0,00                             | 0,92        | 3,16         |
| 117 | Kabupaten Jember        | 0,08                                | 0,83        | 0,00                             | 0,92        | 3,16         |
| 118 | Kabupaten Cianjur       | 0,00                                | 0,83        | 0,00                             | 0,83        | 2,87         |
| 119 | Kabupaten Indramayu     | 0,00                                | 0,83        | 0,00                             | 0,83        | 2,87         |
|     | <b>Rata-Rata</b>        | <b>2,22</b>                         | <b>3,30</b> | <b>2,08</b>                      | <b>7,60</b> | <b>26,21</b> |

Langkah selanjutnya ialah mengategorikan tingkat keterbukaan informasi pemerintah daerah berdasar indeks yang diperoleh dengan menggunakan *Open Budget Index (OBI)*. Hasil pengategorian menunjukkan bahwa hanya ada satu pemerintah daerah dari 119 pemerintah daerah yang tergolong cukup dan berada dalam kategori *substansial*,

sedangkan 118 pemerintah daerah se-Jawa lainnya tergolong dalam peringkat keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*) dengan jumlah pemerintah daerah yang berada dalam kualifikasi terbatas (*limited*) sebanyak 20 pemerintah daerah, 52 pemerintah daerah termasuk dalam kualifikasi minimal (*minimal*), dan 46 pemerintah daerah tergolong dalam kualifikasi sedikit (*scant or none*).

Hasil pengkategorian tingkat keterbukaan informasi anggaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

| No. | Tingkat Keterbukaan Anggaran           | Kategori                              | Skor   | Nama Pemerintah Daerah  |
|-----|--|---------------------------------------|--------|---|
| 1   | Cukup<br>( <i>Sufficient</i> )         | Ekstensif<br>( <i>Extensive</i> )     | 81-100 | -   |
|     |  | Substansial<br>( <i>Substantial</i> ) | 61-80  | Kabupaten Bojonegoro  |
| 2   | Tidak Cukup<br>( <i>Insufficient</i> ) | Terbatas<br>( <i>Limited</i> )        | 41-60  | Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Kota Bandung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sampang, Provinsi Banten, Kota Magelang, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kota Cirebon, Kabupaten Kudus, dan Provinsi DKI Jakarta   |
|     |  | Minimal<br>( <i>Minimal</i> )         | 21-40  | Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blora, Kabupaten Kuningan, Kota Surakarta, Kota Malang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pematang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purbalingga, Kota Bekasi, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Garut, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cirebon, Kota Kediri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kota Depok, Kota Semarang, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, Kota Pasuruan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Bogor, Kabupaten Karanganyar, Kota Salatiga, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Pati. |

| No. | Tingkat Keterbukaan Anggaran | Kategori                            | Skor | Nama Pemerintah Daerah  |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|------|---|
|     |                              | Sedikit<br>( <i>Scant or None</i> ) | 0-20 | Kabupaten Ponorogo, Kota Tegal, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumedang, Kota Cilegon, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kota Batu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Karawang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Subang, Kota Mojokerto, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonogiri, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lumajang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ciamis, Kota Serang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Jepara, Kota Sukabumi, Kabupaten Magetan, Kota Madiun, Kabupaten Jember, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Indramayu |

Berdasarkan hasil pemeringkatan, Provinsi DKI Jakarta memiliki skor tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 15,67 (58,02%) sehingga Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah se-Jawa pada tahun 2016. Di lain pihak, Kabupaten Madiun memiliki skor terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,92 (3,40%) sehingga Kabupaten Madiun menduduki

peringkat ke-119 dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah se-Jawa pada tahun 2016. Apabila dilihat dari tahap pengelolaan keuangan daerah, tahap yang paling banyak dipenuhi oleh pemerintah daerah se-Jawa ialah tahap pelaksanaan dengan rata-rata skor sebesar 2,41. Selanjutnya, tahap yang paling sedikit dipenuhi ialah tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan rata-rata skor sebesar 0,74.

| No. | Nama Pemerintah Daerah | Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah |             |                                  | Total | Indeks (%) |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|------------|
|     |                        | Perencanaan                         | Pelaksanaan | Pelaporan dan Pertanggungjawaban |       |            |
| 1   | Provinsi DKI Jakarta   | 4,17                                | 6,75        | 4,75                             | 15,67 | 58,02      |
| 2   | Kabupaten Bojonegoro   | 7,00                                | 5,50        | 1,17                             | 13,67 | 50,62      |
| 3   | Provinsi Jawa Tengah   | 4,42                                | 5,83        | 2,83                             | 13,08 | 48,46      |

| No. | Nama Pemerintah Daerah | Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah |             |                                  | Total | Indeks (%) |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|------------|
|     |                        | Perencanaan                         | Pelaksanaan | Pelaporan dan Pertanggungjawaban |       |            |
| 4   | Kabupaten Malang       | 6,00                                | 3,92        | 2,50                             | 12,42 | 45,99      |
| 5   | Provinsi Jawa Timur    | 4,67                                | 4,83        | 2,33                             | 11,83 | 43,83      |
| 6   | Kabupaten Banyuwangi   | 5,00                                | 5,67        | 1,08                             | 11,75 | 43,52      |
| 7   | Kota Magelang          | 7,25                                | 3,75        | 0,75                             | 11,75 | 43,52      |
| 8   | Kabupaten Jombang      | 5,67                                | 4,50        | 1,25                             | 11,42 | 42,28      |
| 9   | Kabupaten Trenggalek   | 5,58                                | 4,08        | 1,50                             | 11,17 | 41,36      |
| 10  | Kabupaten Tegal        | 6,42                                | 3,83        | 0,92                             | 11,17 | 41,36      |
| 11  | D.I. Yogyakarta        | 4,58                                | 3,83        | 2,00                             | 10,42 | 38,58      |
| 12  | Kabupaten Bantul       | 3,92                                | 4,83        | 1,58                             | 10,33 | 38,27      |
| 13  | Kabupaten Batang       | 4,58                                | 4,50        | 1,08                             | 10,17 | 37,65      |
| 14  | Kota Yogyakarta        | 4,92                                | 3,75        | 1,33                             | 10,00 | 37,04      |
| 15  | Kabupaten Kudus        | 5,92                                | 2,83        | 1,00                             | 9,75  | 36,11      |
| 16  | Kabupaten Cilacap      | 3,58                                | 4,83        | 1,08                             | 9,50  | 35,19      |
| 17  | Kabupaten Pemalang     | 4,08                                | 4,00        | 0,92                             | 9,00  | 33,33      |
| 18  | Provinsi Banten        | 4,17                                | 3,00        | 1,58                             | 8,75  | 32,41      |
| 19  | Kabupaten Demak        | 2,67                                | 4,50        | 1,25                             | 8,42  | 31,17      |
| 20  | Kabupaten Purworejo    | 4,33                                | 2,33        | 1,58                             | 8,25  | 30,56      |
| 21  | Kabupaten Magelang     | 3,75                                | 3,00        | 1,42                             | 8,17  | 30,25      |
| 22  | Kabupaten Blitar       | 4,83                                | 2,00        | 1,33                             | 8,17  | 30,25      |
| 23  | Kabupaten Majalengka   | 1,00                                | 5,33        | 1,58                             | 7,92  | 29,32      |
| 24  | Kabupaten Sampang      | 3,17                                | 3,17        | 1,58                             | 7,92  | 29,32      |
| 25  | Kabupaten Bondowoso    | 3,58                                | 3,17        | 1,08                             | 7,83  | 29,01      |
| 26  | Provinsi Jawa Barat    | 2,50                                | 3,67        | 1,42                             | 7,58  | 28,09      |
| 27  | Kota Surabaya          | 2,67                                | 3,50        | 1,17                             | 7,33  | 27,16      |
| 28  | Kabupaten Bogor        | 1,67                                | 4,67        | 0,75                             | 7,08  | 26,23      |
| 29  | Kabupaten Klaten       | 3,83                                | 2,67        | 0,58                             | 7,08  | 26,23      |
| 30  | Kota Cirebon           | 2,00                                | 3,67        | 1,33                             | 7,00  | 25,93      |
| 31  | Kabupaten Rembang      | 2,67                                | 3,25        | 0,92                             | 6,83  | 25,31      |
| 32  | Kota Blitar            | 4,50                                | 1,75        | 0,50                             | 6,75  | 25,00      |
| 33  | Kabupaten Wonosobo     | 3,92                                | 1,92        | 0,83                             | 6,67  | 24,69      |
| 34  | Kabupaten Brebes       | 3,75                                | 2,50        | 0,42                             | 6,67  | 24,69      |
| 35  | Kabupaten Sidoarjo     | 1,75                                | 3,50        | 1,25                             | 6,50  | 24,07      |
| 36  | Kabupaten Lebak        | 3,00                                | 3,08        | 0,42                             | 6,50  | 24,07      |
| 37  | Kabupaten Pekalongan   | 2,50                                | 2,83        | 1,00                             | 6,33  | 23,46      |
| 38  | Kabupaten Purbalingga  | 2,58                                | 3,25        | 0,50                             | 6,33  | 23,46      |
| 39  | Kota Probolinggo       | 4,00                                | 1,67        | 0,58                             | 6,25  | 23,15      |
| 40  | Kabupaten Grobogan     | 3,67                                | 1,92        | 0,58                             | 6,17  | 22,84      |
| 41  | Kabupaten Pati         | 1,92                                | 2,83        | 1,33                             | 6,08  | 22,53      |
| 42  | Kabupaten Kuningan     | 2,17                                | 2,92        | 0,83                             | 5,92  | 21,91      |

| No. | Nama Pemerintah Daerah | Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah |             |                                  | Total | Indeks (%) |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|------------|
|     |                        | Perencanaan                         | Pelaksanaan | Pelaporan dan Pertanggungjawaban |       |            |
| 43  | Kota Bekasi            | 1,50                                | 2,92        | 1,42                             | 5,83  | 21,60      |
| 44  | Kota Surakarta         | 2,50                                | 2,08        | 1,25                             | 5,83  | 21,60      |
| 45  | Kabupaten Tulungagung  | 1,92                                | 3,17        | 0,75                             | 5,83  | 21,60      |
| 46  | Kabupaten Kulonprogo   | 2,25                                | 2,08        | 1,33                             | 5,67  | 20,99      |
| 47  | Kota Tangerang         | 2,92                                | 1,83        | 0,83                             | 5,58  | 20,68      |
| 48  | Kabupaten Sukoharjo    | 2,42                                | 2,25        | 0,83                             | 5,50  | 20,37      |
| 49  | Kabupaten Semarang     | 2,33                                | 2,50        | 0,67                             | 5,50  | 20,37      |
| 50  | Kota Bogor             | 2,92                                | 2,08        | 0,50                             | 5,50  | 20,37      |
| 51  | Kabupaten Kendal       | 3,25                                | 1,83        | 0,33                             | 5,42  | 20,06      |
| 52  | Kabupaten Blora        | 1,83                                | 3,08        | 0,25                             | 5,17  | 19,14      |
| 53  | Kabupaten Banyumas     | 2,50                                | 2,00        | 0,58                             | 5,08  | 18,83      |
| 54  | Kabupaten Sleman       | 2,00                                | 2,42        | 0,58                             | 5,00  | 18,52      |
| 55  | Kabupaten Pasuruan     | 3,25                                | 1,25        | 0,50                             | 5,00  | 18,52      |
| 56  | Kota Salatiga          | 2,00                                | 1,83        | 1,08                             | 4,92  | 18,21      |
| 57  | Kabupaten Temanggung   | 1,42                                | 2,50        | 1,00                             | 4,92  | 18,21      |
| 58  | Kabupaten Serang       | 2,42                                | 2,08        | 0,42                             | 4,92  | 18,21      |
| 59  | Kota Bandung           | 1,58                                | 2,17        | 1,08                             | 4,83  | 17,90      |
| 60  | Kabupaten Mojokerto    | 2,67                                | 1,50        | 0,58                             | 4,75  | 17,59      |
| 61  | Kabupaten Situbondo    | 1,75                                | 2,92        | 0,08                             | 4,75  | 17,59      |
| 62  | Kota Kediri            | 1,50                                | 2,58        | 0,58                             | 4,67  | 17,28      |
| 63  | Kota Malang            | 1,25                                | 2,50        | 0,83                             | 4,58  | 16,98      |
| 64  | Kabupaten Garut        | 1,42                                | 2,50        | 0,67                             | 4,58  | 16,98      |
| 65  | Kota Semarang          | 1,50                                | 2,00        | 1,00                             | 4,50  | 16,67      |
| 66  | Kabupaten Karawang     | 1,50                                | 2,67        | 0,33                             | 4,50  | 16,67      |
| 67  | Kabupaten Banjarnegara | 2,00                                | 1,75        | 0,67                             | 4,42  | 16,36      |
| 68  | Kabupaten Gunungkidul  | 2,00                                | 1,75        | 0,58                             | 4,33  | 16,05      |
| 69  | Kabupaten Kebumen      | 1,67                                | 2,17        | 0,42                             | 4,25  | 15,74      |
| 70  | Kabupaten Tangerang    | 0,00                                | 3,17        | 1,00                             | 4,17  | 15,43      |
| 71  | Kabupaten Tasikmalaya  | 1,83                                | 1,58        | 0,75                             | 4,17  | 15,43      |
| 72  | Kota Pasuruan          | 1,17                                | 2,33        | 0,58                             | 4,08  | 15,12      |
| 73  | Kabupaten Jember       | 3,08                                | 0,92        | 0,00                             | 4,00  | 14,81      |
| 74  | Kota Pekalongan        | 0,67                                | 1,83        | 1,42                             | 3,92  | 14,51      |
| 75  | Kabupaten Ponorogo     | 1,50                                | 1,83        | 0,42                             | 3,75  | 13,89      |
| 76  | Kabupaten Cirebon      | 1,08                                | 1,83        | 0,67                             | 3,58  | 13,27      |
| 77  | Kabupaten Pangandaran  | 1,25                                | 1,42        | 0,83                             | 3,50  | 12,96      |
| 78  | Kabupaten Lamongan     | 0,58                                | 2,58        | 0,33                             | 3,50  | 12,96      |
| 79  | Kota Depok             | 0,58                                | 1,75        | 1,00                             | 3,33  | 12,35      |
| 80  | Kabupaten Karanganyar  | 0,67                                | 2,42        | 0,25                             | 3,33  | 12,35      |
| 81  | Kota Cilegon           | 0,92                                | 1,83        | 0,50                             | 3,25  | 12,04      |

| No. | Nama Pemerintah Daerah | Tahapan Pengelolaan Keuangan Daerah |             |                                  | Total       | Indeks (%)   |
|-----|------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------|
|     |                        | Perencanaan                         | Pelaksanaan | Pelaporan dan Pertanggungjawaban |             |              |
| 82  | Kabupaten Bandung      | 0,67                                | 2,08        | 0,42                             | 3,17        | 11,73        |
| 83  | Kabupaten Wonogiri     | 1,08                                | 1,50        | 0,50                             | 3,08        | 11,42        |
| 84  | Kota Banjar            | 0,75                                | 1,92        | 0,42                             | 3,08        | 11,42        |
| 85  | Kota Mojokerto         | 1,50                                | 1,33        | 0,25                             | 3,08        | 11,42        |
| 86  | Kabupaten Pandeglang   | 1,25                                | 1,67        | 0,17                             | 3,08        | 11,42        |
| 87  | Kabupaten Bangkalan    | 1,75                                | 1,17        | 0,08                             | 3,00        | 11,11        |
| 88  | Kabupaten Purwakarta   | 0,75                                | 1,67        | 0,50                             | 2,92        | 10,80        |
| 89  | Kabupaten Sumenep      | 0,83                                | 1,67        | 0,42                             | 2,92        | 10,80        |
| 90  | Kabupaten Tuban        | 0,42                                | 2,25        | 0,25                             | 2,92        | 10,80        |
| 91  | Kota Cimahi            | 0,92                                | 1,83        | 0,17                             | 2,92        | 10,80        |
| 92  | Kabupaten Boyolali     | 1,42                                | 1,17        | 0,08                             | 2,67        | 9,88         |
| 93  | Kota Batu              | 0,67                                | 1,50        | 0,42                             | 2,58        | 9,57         |
| 94  | Kota Tegal             | 0,75                                | 1,42        | 0,42                             | 2,58        | 9,57         |
| 95  | Kabupaten Kediri       | 0,67                                | 1,58        | 0,33                             | 2,58        | 9,57         |
| 96  | Kabupaten Subang       | 1,33                                | 1,08        | 0,08                             | 2,50        | 9,26         |
| 97  | Kabupaten Sumedang     | 0,58                                | 1,42        | 0,42                             | 2,42        | 8,95         |
| 98  | Kabupaten Pacitan      | 0,75                                | 1,25        | 0,25                             | 2,25        | 8,33         |
| 99  | Kabupaten Probolinggo  | 0,25                                | 1,58        | 0,33                             | 2,17        | 8,02         |
| 100 | Kota Tangerang Selatan | 0,17                                | 1,58        | 0,33                             | 2,08        | 7,72         |
| 101 | Kabupaten Ngawi        | 0,00                                | 1,50        | 0,33                             | 1,83        | 6,79         |
| 102 | Kabupaten Gresik       | 0,17                                | 1,50        | 0,17                             | 1,83        | 6,79         |
| 103 | Kota Sukabumi          | 0,83                                | 0,92        | 0,08                             | 1,83        | 6,79         |
| 104 | Kabupaten Sragen       | 0,50                                | 1,25        | 0,00                             | 1,75        | 6,48         |
| 105 | Kabupaten Jepara       | 0,83                                | 0,92        | 0,00                             | 1,75        | 6,48         |
| 106 | Kabupaten Ciamis       | 0,00                                | 0,92        | 0,67                             | 1,58        | 5,86         |
| 107 | Kabupaten Nganjuk      | 0,00                                | 1,50        | 0,08                             | 1,58        | 5,86         |
| 108 | Kab. Bandung Barat     | 0,17                                | 1,17        | 0,17                             | 1,50        | 5,56         |
| 109 | Kota Serang            | 0,25                                | 0,92        | 0,17                             | 1,33        | 4,94         |
| 110 | Kabupaten Sukabumi     | 0,42                                | 0,92        | 0,00                             | 1,33        | 4,94         |
| 111 | Kabupaten Lumajang     | 0,08                                | 1,00        | 0,08                             | 1,17        | 4,32         |
| 112 | Kabupaten Pamekasan    | 0,08                                | 1,00        | 0,08                             | 1,17        | 4,32         |
| 113 | Kota Tasikmalaya       | 0,08                                | 1,00        | 0,00                             | 1,08        | 4,01         |
| 114 | Kabupaten Magetan      | 0,00                                | 1,00        | 0,00                             | 1,00        | 3,70         |
| 115 | Kota Madiun            | 0,00                                | 1,00        | 0,00                             | 1,00        | 3,70         |
| 116 | Kabupaten Bekasi       | 0,08                                | 0,92        | 0,00                             | 1,00        | 3,70         |
| 117 | Kabupaten Cianjur      | 0,00                                | 0,92        | 0,00                             | 0,92        | 3,40         |
| 118 | Kabupaten Indramayu    | 0,00                                | 0,92        | 0,00                             | 0,92        | 3,40         |
| 119 | Kabupaten Madiun       | 0,00                                | 0,92        | 0,00                             | 0,92        | 3,40         |
|     | <b>Rata-Rata</b>       | <b>2,13</b>                         | <b>2,41</b> | <b>0,74</b>                      | <b>5,29</b> | <b>19,59</b> |



Langkah selanjutnya ialah mengategorikan tingkat keterbukaan informasi pemerintah daerah berdasar indeks yang diperoleh dengan menggunakan *Open Budget Index* (OBI). Hasil pengategorian menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pemerintah daerah dari 119 pemerintah daerah yang memiliki keterbukaan anggaran cukup (*sufficient*). 119 pemerintah daerah se-Jawa tergolong dalam peringkat keterbukaan anggaran

tidak cukup (*insufficient*) dengan jumlah pemerintah daerah yang berada dalam kualifikasi terbatas (*limited*) sebanyak 10 pemerintah daerah, 37 pemerintah daerah termasuk dalam kualifikasi minimal (*minimal*), dan 72 pemerintah daerah tergolong dalam kualifikasi sedikit (*scant or none*).

Hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi anggaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

| No. | Tingkat Keterbukaan Anggaran        | Kategori                           | Skor   | Nama Pemerintah Daerah   |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|--------|--|
| 1   | Cukup ( <i>Sufficient</i> )         | Ekstensif ( <i>Extensive</i> )     | 81-100 | -  |
|     |                                     | Substansial ( <i>Substantial</i> ) | 61-80  | -  |
| 2   | Tidak Cukup ( <i>Insufficient</i> ) | Terbatas ( <i>Limited</i> )        | 41-60  | Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kota Magelang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tegal  |
|     |                                     | Minimal ( <i>Minimal</i> )         | 21-40  | Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Batang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pemasang, Provinsi Banten, Kabupaten Demak, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Klaten, Kota Cirebon, Kabupaten Rembang, Kota Blitar, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kota Probolinggo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Kuningan, Kota Bekasi, Kota Surakarta, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kulonprogo, dan Kota Tangerang. |

| No. | Tingkat Keterbukaan Anggaran | Kategori                            | Skor | Nama Pemerintah Daerah   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|------|--|
|     |                              | Sedikit<br>( <i>Scant or None</i> ) | 0-20 | Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kota Bogor, Kabupaten Kendal, Kabupaten Blora, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pasuruan, Kota Salatiga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Serang, Kota Bandung, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Situbondo, Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kota Pekalongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Lamongan, Kota Depok, Kabupaten Karanganyar, Kota Cilegon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Wonogiri, Kota Banjar, Kota Mojokerto, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Cimahi, Kabupaten Boyolali, Kota Tegal, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Gresik, Kota Sukabumi, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sragen, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bandung Barat, Kota Serang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pamekasan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Magetan, Kota Madiun, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Madiun. |

### *Pengidentifikasian Karakteristik Pemerintah Daerah dengan Tingkat Transparansi Tertinggi dan Terendah*

Pengidentifikasian bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang membedakan pemerintah daerah yang memperoleh predikat tertinggi dan terendah. Pengidentifikasian dilakukan pada 10 pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan 10 pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah.

Identifikasi karakteristik dilihat berdasarkan ukuran legislatif (jumlah anggota DPRD), kompleksitas pemerintah daerah (jumlah penduduk), ukuran pemerintah daerah (total asset), opini atas LKPD, tingkat kesejahteraan daerah (PDRB per kapita), kekayaan pemerintah daerah (rasio PAD), belanja daerah, kompetisi politik, *press visibility*, dan Indeks Pembangunan Manusia. Dari hasil identifikasi dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata 10 pemerintah kabupaten/kota dengan indeks transparansi tertinggi memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kekayaan pemerintah daerah yang lebih tinggi, kompetisi politik yang lebih rendah, *press visibility* yang lebih tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 10 pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.

### **KESIMPULAN**

Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada

pemerintah daerah di Jawa ialah sebesar 26,21% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 19,59% di tahun 2016. Hasil pengkategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Bojonegoro yang berada dalam kategori cukup (*sufficient*) pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 seluruh pemerintah daerah di Jawa berada dalam kategori tidak cukup (*insufficient*).

### **KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti:

- Penelitian hanya dilakukan pada pemerintah daerah se-Jawa sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan di Indonesia.
- Dalam pengukurannya, kriteria yang digunakan masih memiliki bobot yang sama sehingga belum menggambarkan kriteria mana yang paling penting.
- Penelitian ini hanya sebatas membedakan karakteristik pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dan terendah sehingga belum mencari secara komprehensif hal-hal yang menyebabkan tinggi rendahnya indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, saran untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah ialah sebagai berikut:

- a. Menambah penelitian sehingga dapat melihat peringkat indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah se-Indonesia.
- b. Menentukan pembobotan melalui wawancara, *focus group discussion*, dan validitas ahli.
- c. Pengujian yang lebih komprehensif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerahnya dengan menampilkan indikator dokumen pengelolaan keuangan daerah yang ada di *website* resminya secara tepat waktu untuk kepentingan publik.
- e. Kementrian Dalam Negeri dapat melakukan pengukuran dan

pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga termotivasi untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik. Selain itu, Kementrian Dalam Negeri dapat menerapkan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menepati Instruksi Mendagri No.188.52/1797/SJ/2012.

- f. Kementrian Keuangan dapat agar dapat memberikan *reward* kepada pemerintah daerah dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website terbaik dan memberikan *punishment* kepada pemerintah daerah dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* terburuk.
- g. Masyarakat dapat menggunakan haknya dengan memanfaatkan informasi yang tersedia di website pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

### Daftar Pustaka

- Arista, Dessy. 2015. *Transparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Attila, Gyorgy. 2012. "Agency Problems in Public Sector". Diakses pada 15 April 2017. <http://anale.steconomieuoradea.ro/volume/2012/n1/101.pdf>.
- Huwae, Kartini. 2016. *Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- International Budget Partnership (IBP), 2015. "Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live." Diakses pada 20 Februari 2017. <http://internationalbudget.org/wpcont>

- ent/uploads/OBS2015-Report-English.pdf
- International Fund For Agricultural Development. 1999. *Good Governance: An Overview*. Roma.
- Martani, Dwi., Debby Fitriasari, dan Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency on the Local Government Websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol. 60 No.3 Universitas Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. 2013. "Indeks Keterbukaan Badan Publik Menyediakan Informasi Anggaran Secara Berkala: Mengukur keterbukaan anggaran berbasis website". Diakses pada 19 Maret 2017. [https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2013/03/Indeks-Keterbukaan-Berkala\\_11mar13.pdf](https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2013/03/Indeks-Keterbukaan-Berkala_11mar13.pdf)
- Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Tesis*. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2007. "What is Governance". Diakses pada 19 Maret 2017. <http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>

